

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku.

- Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Afandi, Ali. Tanpa tahun. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Afandi, Ali. 2006. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arto, Ahmad Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hock Oen Lie. 1961. *Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta. Kengpo.
- Nico, Ngani dan Jaya Budi Nyoman I. 1984. *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*. Yogyakarta. Liberty.
- Wirjono, Projodikoro R. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta. Sumur Bandung.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswowiratno. 2011. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta : PT Reneka Cipta.
- Syahrani Riduan. 2002. *Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS*. Jakarta : PT. Melton Putra.
- Soekanto, Soejono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tobing. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Dian Rakyat

Vollmar, 2003. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali

B. Kelompok Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd).

Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) Stb. Nomor 227 Tahun 1927.

Herzien Indonesis Reglement (HIR) Stb. 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 1 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 tentang Pengaturan Masalah Kewenangan Di Bidang Catatan Sipil

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.